

## TAJUK RENCANA

### Perjelas Status Tenaga Honorer

**RANCANGAN** Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna DPR RI Selasa (3/10). Isu krusial dalam RUU tersebut adalah tersedianya pa-

yang hukum penataan non ASN (honorar) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang, mayoritas berada di instansi daerah. Prinsip utama yang terkandung dalam RUU tersebut adalah tidak ada PHK massal sebagai mana digariskan Presiden Jokowi sejak awal (KR 4/10).

Sedang prinsip utama lainnya, tidak boleh ada penurunan pendapatan tenaga non ASN, mengingat kontribusi mereka sangat signifikan. Pengesahan RUU ASN menjadi UU tentu disambut gembira jutaan tenaga non ASN yang selama ini telah mengabdikan diri dengan bekerja di instansi pemerintah daerah. Paling tidak, pada November nanti, mereka aman tidak akan di-PHK atas jaminan UU.

Begitu pula menyangkut penghasilan mereka, berdasar RUU ini, pendapatan mereka tidak berkurang. Pertanyaannya kemudian, kondisi seperti ini akan berlangsung sampai kapan? Apakah akan berlaku seterusnya sampai disamakan dengan waktu pensiun pegawai negeri sipil (PNS)? Jawaban atas pertanyaan ini akan didapatkan di peraturan organik, yakni peraturan pelaksana UU ASN kalau sudah diberlakukan. Aturan organik ini bentuknya peraturan pemerintah (PP).

Berdasar hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah tak boleh bertentangan atau menyimpang dari undang-undang, dalam hal ini UU ASN. Dengan demikian, dua prinsip

utama, yakni tidak ada PHK massal tenaga non ASN dan tak ada pengurangan pendapatan tenaga non-ASN, tak boleh dihilangkan dalam peraturan pemerintah.

Lebih penting lagi, peraturan pemerintah nanti harus detail memuat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagai salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. Tentu di dalamnya harus diatur pula mekanisme rekrutmen PPPK, terutama bagi mereka yang sudah bertahun-tahun menjadi tenaga honorer.

Prinsip tak ada PHK massal ini harus benar-benar menjadi pegangan dalam menata tenaga honorer, jangan sampai terjadi penyimpangan. Pemerintah atau instansi pengguna jasa di daerah tentu sudah paham dengan konduite tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah daerah. Logikanya, para tenaga honorer ini sudah dapat dinilai apakah memiliki kapasitas di bidang pekerjaannya atau tidak. Dalam konteks itulah perekrutan PPPK dapat dilakukan secara sederhana dan berbiaya murah.

Menyamakan tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun dengan calon tenaga baru atau fresh graduate dalam penerimaan PPPK adalah kesalahan fatal dan sama saja dengan tidak menghargai pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Padahal, semangat tidak adanya PHK massal tenaga honorer sebagaimana tertuang dalam RUU ASN, merupakan bentuk penghargaan bagi mereka yang selama ini telah bekerja dengan baik di instansi pemerintah daerah. Jadi, wajar bila mereka mendapat perlakuan yang khusus atas pengabdian mereka. □-d

# Merawat Netralitas Politik TNI

Edwi Arief Sosiawan

LINI sejarah mencatat, TNI pernah memiliki fungsi sebagai kekuatan sosial dan politik pada masa orde baru. Saat itu TNI memberikan kontribusi terhadap stabilitas politik, mampu meminimalisir gejolak keamanan dan gerakan makar, sehingga tercapai kestabilan di bidang ekonomi. Peran TNI yang sangat kuat dalam pembangunan nasional. Namun kondisi tersebut juga memiliki kekurangan, ada hegemoni TNI dalam berbagai bidang termasuk di dalamnya adalah bidang politik yang memunculkan ketidakadilan serta pengaruh politik yang berlebihan. Sehingga demokratisasi tidak berjalan semestinya.

Sejak reformasi 1998 TNI kembali kepada fungsinya dan bersifat netral dalam percaturan politik. Politik TNI saat ini adalah politik negara, yaitu politik yang mendukung kebijakan negara. Asumsi dasarnya, negara melaksanakan program kerjanya untuk kepentingan rakyat. Makna tersebut menunjukkan bahwa TNI harus beroperasi di bawah kontrol dan otoritas pemerintah sipil yang demokratis dan independen.

Konsep ini dikenal sebagai prinsip sipil-militer atau prinsip peradilan sipil. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa TNI harus tunduk pada pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis dan tidak memiliki peran aktif dalam keputusan politik negara. TNI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, bukan untuk mempengaruhi atau terlibat dalam kebijakan politik. Ini adalah prinsip dasar dalam demokrasi yang memastikan bahwa militer tidak memiliki kendali atas pemerintahan.

### Berprinsip Netral

Menjelang Pemilu 2024, TNI harus tetap berprinsip netral seperti prinsip pengalangan pemilihan umum sebelumnya. Netralitas politik TNI bukan bersifat pasif namun harus tetap dinamis. Jika bersifat pasif maka kalau terjadi krisis politik TNI kurang dapat mempengaruhi

atau mendukung pemerintahan yang sah secara politik. Ini bisa mengakibatkan krisis legitimasi pemerintah, terutama jika ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang terpilih. Pada sisi lain pemberian peran yang terlalu kecil dalam politik akan menyebabkan dalam kondisi darurat ataupun krisis politik yang serius akan menghambat kemampuan TNI untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melin-



KR-JOKO SANTOSO

dungi negara dan masyarakat.

Untuk itu di tahun politik ini, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan TNI. Kebijakan utama adalah mematuhi netralitas politik secara ketat sebagai kunci pokoknya. Seperti tidak terlibat dalam kampanye politik baik langsung maupun tidak langsung, tidak mendukung calon tertentu baik secara tendensius maupun non tendensius apalagi mempengaruhi hasil pemilu dengan cara apapun. Untuk melaksanakan amanah netralitas tersebut, institusi TNI harus tunduk pengawasan dan kon-

trol pemerintah sipil yang demokratis dan lembaga-lembaga pengawasan sipil yang ada, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Peran aktif TNI juga diperlukan dalam keterlibatan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dalam pemilu dan hak-hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara.

### Pemahaman Demokrasi

Pada sisi lain peran aktif TNI dalam memberikan pendidikan dan pelatihan semua personel militer dalam pemahaman demokrasi, pemilu yang adil. Dan peran militer dalam sistem demokrasi juga sangat diperlukan selain kesiap-siagaan dalam keaktifan menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. Serta memastikan, pemilu berlangsung dengan aman dan damai. Selain itu TNI sebaiknya bersedia untuk menerima pengawasan dan laporan dari masyarakat sipil dan LSM yang berfokus pada pemilu untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip demokrasi.

Melalui kebijakan tersebut, TNI dapat menjaga netralitas politik, mendukung pemilu yang adil dan aman. Dan membantu menjaga stabilitas politik selama proses Pemilu 2024 secara umum. Serta memperkuat sistem demokratis Indonesia secara khusus. □-d

\*) **Dr Edwi Arief Sosiawan**, Sekum IKA Mahakarta & Assoc Prof MIKOM UPN Veteran Yogyakarta

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

# PDIP dan Misi Kedaulatan Pangan Indonesia

Diko AR Primadi

**RAPAT** Kerja Nasional (Rakernas) PDIP IV tahun 2023 mengusung tema Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Tema dipilih tentu berdasarkan beberapa pertimbangan yang sangat matang dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di antaranya, semakin memanasnya situasi geopolitik kawasan di samping perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai. Situasi ini menyebabkan beberapa rantai pasokan pangan dari negara produsen terhenti.

Selain itu ancaman terjadinya krisis pangan yang disebabkan cuaca dan iklim juga semakin nyata. El-Nino yang menyebabkan kekeringan ekstrim dan mengganggu produksi pangan membuat banyak negara mulai membatasi eksportnya, termasuk ke Indonesia. Beberapa negara seperti Uganda, Rusia, Bangladesh, India, Pakistan, dan Myanmar telah mengkonfirmasi untuk menghentikan ekspor pangannya ke beberapa negara mitra.

Salah satu komoditas pangan yang dihentikan eksportnya adalah beras. Beras yang ditanak dan kemudian menjadi nasi telah menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mulai dari mereka yang hidup di perkotaan hingga di pedesaan, semuanya makan nasi. Jika permasalahan ini tidak segera disikapi dengan serius, bencana akan kekurangan pangan bisa menyebabkan ketidakstabilan sebuah negara.

Maka isu kedaulatan pangan yang ditawarkan PDIP tentu sangat relevan dengan tantangan Indonesia ke depan. Hal ini juga sejalan dengan idealisme *founding father* Ir Soekarno dan sekaligus presiden pertama yang selalu memimpikan Indonesia menjadi negara berdaulat. Karenanya, kedaulatan pangan dapat menjadi solusi bagi Indonesia untuk bisa bertahan di tengah kondisi

ketidakpastian global. Bukan hanya bertahan, dengan segala potensi yang dimilikinya, Indonesia sejatinya mampu menjadi negara utama dalam penyuplai komoditas pangan ke seluruh dunia.

Dengan mencanangkan kedaulatan pangan, Indonesia juga dapat mengurangi ketergantungannya pada impor. Ketergantungan pada impor sejatinya dapat membuat kedaulatan dari sebuah bangsa terganggu. Apalagi pangan menjadi sektor penting penopang utama kehidupan sebuah bangsa. Tanpa kedaulatan di sektor pangan, tentu akan sangat sulit bagi kita untuk merengkuh masa depan gemilang. Meminjam Soekarno, hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat.

### Mustikarasa

Ide kedaulatan pangan sudah ada sejak lama, diwariskan Soekarno kepada Bangsa Indonesia. Ide dituangkan di dalam buku berjudul *Mustikarasa* (1967) yang mengulas berbagai macam resep makanan Nusantara, makanan lokal dari Sabang sampai Merauke. Buku tebal 1.123 halaman itu memiliki sekitar 1.600 resep masakan. Selain makanan, buku tersebut juga membahas tata dapur yang baik, bagaimana cara mempertimbangkan gizi yang seimbang, cara membuat jajanan, cara melipat ketupat, dan lain sebagainya.

Buku ini pun tak lupa diulas Megawati dalam pidatonya yang berapi-api dan penuh semangat. Ia percaya, Bangsa Indonesia bisa berdaulat secara pangan

karena diberkahi kekayaan alam yang melimpah. Menurut sumber makanan di Indonesia sangat bervariasi, bukan hanya beras. Ada jagung, umbi-umbian, sagu, kedelai, dan masih banyak lainnya. Kesemuanya dapat diolah menjadi sumber makanan yang enak dan bergizi demi kedaulatan pangan Indonesia.

Optimisme tersebut juga perlu dibarengi dengan optimalisasi penggunaan teknologi terapan untuk membantu petani menghasilkan jumlah panen yang lebih besar dari sebelumnya. Sebagai sosok yang mengepalai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), anak dari Proklamator Bung Karno tersebut seolah paham, tanpa ada dorongan dari teknologi di bidang pertanian, akan sangat sulit bagi Indonesia menciptakan kedaulatan pangannya sendiri. □-d

\*) **Diko Ahmad Riza Primadi**, Mahasiswa Magister Pendidikan Matematika UAD, jurnalis Suara Muhammadiyah

# Pojok KR

UU ASN disahkan, tak ada PHK massal tenaga honorer.

-- Diharapkan pula tak ada PHK secara sporadis.

\*\*\*

Bila ASN pindah ke IKN, Presiden siapkan rumah dinas dan tunjangan.

-- Termasuk tunjangan transportasi pulang ke daerah ?

\*\*\*

Mentan Syahrul Yasin Limpo tak diketahui keberadaannya.

-- Gelagat tak mau tanggung jawab.

*Berabe*

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
@pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

## Rapikan Parkir Anghong-Becak di Malioboro

**MALIOBORO** itu magnet. Mengunjungi Yogya belum lengkap tanpa mengunjungi Malioboro. Karena itu, dibuat seperti apa pun Malioboro selalu menarik dan bagi orang luar Yogya, tetep tanpa cela. Hanya menarik dan menarik. Tidak heran bila kota lain 'meniru'dan menghadirkan Malioboro di Tegal, Tasikmalaya dan lainnya.

Pekan lalu saya mengunjungi Malioboro sore hari. Mungkin karena malam terakhir Gamelan Sekaten dan besoknya ada Grebeg Maulud. Artinya hari libur. *Masya Allah* kawasan ini penuh orang berjalan kaki, dan tampaknya rombongan dari luar kota juga. Bagi saya, luar biasa. Orang berfoto dengan tulisan Malioboro di ujung Utara jalan, sampai antre.

Hanya saya sempat terkejut (dan agak *gela*) setelah agak ke tengah karena ternyata parkir anghong dan becak - kebanyakan becak mesin - yang tidak rapih. Beberapa anghong, parkir agak menjorok ke jalan, sehingga kuda lebih ke depan. Bahkan beberapa anghong tampak parkir di jalan, bukan tempat parkir.

Mungkin karena lahan yang digunakan parkir anghong dan becak penuh, sehingga ada yang sampai ke jalan. Namun tentu hal itu membuat tidak rapih dan sangat berbahaya baik bagi anghong/becak tersebut namun juga bagi pengguna lalu lintas. Ini sekadar sumbangan, dan semoga mendapat perhatian.

\*) **Wahyuning SAG**,  
Jl Achmad Yani Magelang

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

## Kedaulatan Rakyat

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d SI, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

### Perwakilan dan Biro:

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP